

KEADILAN SOSIAL DALAM REFLEKSI PANCASILA

Mantasia Hasibuan *¹

¹ Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Universitas Negeri Medan

*e-mail : Mantasiamentasiahassibuan@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keadilan sosial dalam refleksi pancasila, pancasila menjadi landasan filosofia dan ideologi bagi bangsa Indonesia, terutama dalam mengatasi masa-masa gelap sejarahnya yang dipenuhi dengan penderitaan akibat keadilan sosial sebagai warisan bangsa Indonesia memperkuat peran pancasila dalam membentuk identitas nasional dan menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Konkritnya, implementasi Pancasila dalam kebijakan sosial, ekonomi, dan politik membutuhkan pembahasan mendalam. Melalui penelitian studi kepustakaan, Pancasila dipandang sebagai fondasi untuk menciptakan keadilan sosial, diwujudkan dalam pembangunan ekonomi yang inklusif, perlindungan hak asasi manusia, persatuan dan kesatuan bangsa, serta penguatan lembaga hukum. Namun, dalam prakteknya, terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai ideal Pancasila dan realitas sosial yang dihadapi, seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan kesadaran dan komitmen untuk mewujudkan Pancasila secara konkret dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia.

Kata kunci : Keadilan sosial dalam refleksi pancasila

Abstract

This research aims to find out about social justice in the reflection of Pancasila, Pancasila is the philosophical and ideological basis for the Indonesian nation, especially in overcoming the dark times of its history which are filled with suffering due to social justice as a legacy of the Indonesian nation, strengthening the role of Pancasila in forming national identity and becoming a foundation for social, national and state life. Concretely, the implementation of Pancasila in social, economic and political policies requires in-depth discussion. Through literature study research, Pancasila is seen as the foundation for creating social justice, realized in inclusive economic development, protection of human rights, national unity and unity, as well as strengthening legal institutions. However, in practice, there is a mismatch between the ideal values of Pancasila and the social realities faced, such as economic inequality, corruption and human rights violations. To overcome this, awareness and commitment are needed to realize Pancasila concretely in every aspect of Indonesian society's life.

Keywords : Social Justice in reflection of pancasila

PENDAHULUAN

Pancasila berawal dari masa gelap sejarah bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengalami penderitaan, penindasan, penghinaan, dan penghisapan oleh penjajahan Belanda dan Jepang. Pemikiran Soekarno tentang masa gelap tersebut membuktikan bahwa keadilan sosial harus diwujudkan sebagai warisan dan etika bangsa Indonesia yang harus diraih.

Keadilan sosial adalah salah satu prinsip dasar dalam ideologi Pancasila, yang terdiri dari lima sila: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional yang memiliki peran penting dalam membentuk identitas bangsa Indonesia dan sebagai landasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ditegaskan sebagai tujuan utama. Keadilan sosial berarti bahwa struktur dan proses kehidupan masyarakat harus disusun sedemikian rupa sehingga tercapai keadilan. Keadilan sosial ini tidak hanya berarti tidak adanya

ketidakadilan, tetapi juga berarti adanya kesetaraan dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara.

Pancasila, sebagai pilar filosofis utama Indonesia, menciptakan landasan ideologis bagi negara Indonesia sejak kemerdekaannya pada tahun 1945. Sebagai suatu sistem nilai yang unik, Pancasila tidak hanya mencerminkan identitas nasional, tetapi juga berfungsi sebagai panduan moral dan sosial bagi masyarakat Indonesia. Dalam jurnal ini, kita akan menjelajahi peran penting Filsafat Pancasila sebagai ideologi negara, menyelusuri akar sejarahnya dan menganalisis dampaknya terhadap pembentukan kebijakan dan tatanan sosial. Pancasila merupakan dasar falsafah negara republik Indonesia dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 diatur oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai dasar negara, Pancasila didirikan membimbing penyesuaian penyelenggaraan negara dan kehidupan masyarakat Indonesia. Notonagoro dalam Rozikin, (1995:10) menjelaskan bahwa Pancasila adalah dasar Negara mempunyai kedudukan khusus dalam berbangsa dan bernegara (peraturan negara dasar). Selain menjadi dasar Negara, Pancasila juga Sumber segala sumber hukum dan pandangan hidup masyarakat Indonesia, juga Pancasila merupakan ruh/jiwa bangsa pancasila juga mengajarkan pentingnya menghargai dan menghormati kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini dapat diartikan sebagai sikap menghormati hak asasi manusia, memperlakukan orang lain dengan baik, serta menghindari diskriminasi dan intoleransi. Selain itu, Pancasila juga menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam menerapkan keadilan sosial, Pancasila menekankan pentingnya penegakan hukum yang mengedepankan nilai-nilai keadilan. Keadilan sosial harus ditunjang dengan penegakan hukum yang berpegang teguh pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila. Dengan demikian, keadilan sosial dapat tercapai tanpa adanya diskriminasi dan ketidakadilan. Dalam konteks implementasi keadilan sosial, Pancasila juga menekankan pentingnya penguatan peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan berbagai elemen masyarakat dalam penyelesaian masalah sosial. Selain itu, peningkatan inklusivitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta penguatan kelembagaan dan koordinasi melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial, juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan keadilan sosial

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian studi kepustakaan yang bertujuan untuk mengetahui pembahasan yang lebih dalam mengenai Keadilan sosial dalam refleksi pancasila: Penelitian ke pustaka ini merupakan pencarian data yang merujuk pada buku-buku, jurnal penelitian yang terlebih dahulu telah di publish baik dari internasional maupun lokal, tulisan ilmiah, dan juga penelitian yang dilakukan oleh orang lain sebelumnya dan juga segala artikel yang diterbitkan dan berkaitan dengan topik. Dalam spesifikasi penelitian ini merupakan deskriptif yang di mana dengan sumber data utama berupa data sekunder. Data sekunder berupa sumber seperti buku, situs, adapun dokumen. Kemudian data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

LANDASAN TEORI

Pancasila dipandang sebagai dasar filosofis dan ideologi bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai keadilan sosial. Keadilan sosial dalam Pancasila fokus pada perlindungan hak asasi manusia dan memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Pancasila juga menekankan pentingnya persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia. Pancasila mempunyai ciri keadilan yang fleksibel

dan mampu memberikan tuntutan jaman dalam mengikuti globalisasi perubahan jaman. Keadilan Pancasila juga berbeda dengan keadilan hukum, karena keadilan Pancasila merupakan nilai moral dan nilai keadilan yang berfungsi sebagai asas-asas hukum. Asas-asas hukum tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan hukum dan diterapkan ke dalam masyarakat sebagai aturan hukum. komitmen Pancasila untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Dalam konteks teori, keadilan sosial menekankan distribusi yang adil dari sumber daya dan kesempatan kepada semua anggota masyarakat dalam upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memberikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya, serta memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Melalui implementasi nilai-nilai Pancasila, Indonesia berupaya mencapai tujuan keadilan sosial dalam semua aspek kehidupan masyarakatnya. Dalam konteks keadilan sosial, Pancasila menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia dan memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Keadilan sosial dalam Pancasila juga fokus pada persatuan dan keasatuan demi terciptanya suasana mendukung bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bagaimana Pancasila dapat diimplementasikan secara konkret dalam kebijakan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia?

Menurut Darmodihardjo (1979), 'Keadilan Sosial' berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di bidang kehidupan, baik materiil maupun spiritual, sedangkan 'seluruh rakyat Indonesia' berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Jadi, 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' berarti bahwa setiap orang Indonesia berhak mendapat perlakuan adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila Keadilan Sosial ini merupakan tujuan dari empat sila yang mendahuluinya dan merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila (Darmodihardjo 1979). Ada tiga prinsip keadilan sosial yang dikemukakan oleh Suryawasita (1989), yaitu keadilan atas dasar hak, keadilan atas dasar jasa, dan keadilan atas dasar kebutuhan. Keadilan atas dasar hak adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan hak untuk diterima oleh seseorang. Keadilan atas dasar jasa adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan seberapa besar jasa yang telah seseorang berikan. Sedangkan keadilan atas dasar kebutuhan adalah keadilan yang diperhitungkan berdasarkan yang seseorang butuhkan.

Filsafat Pancasila memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi ciri khas dan perekat bangsa Indonesia. Filosofi yang terkandung dalam Pancasila harus ditekankan dari sudut pandang yang holistik tentang realitas kehidupan bangsa yang majemuk. Hal ini menonjolkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, semangat ini harus menjadi landasan kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, ada kesatuan dalam keberagaman yang ada. Hal inilah yang disebut dengan Bhineka Tunggal Ika inti dari Filsafat Pancasila. Kerinduan bangsa Indonesia untuk mencapai kesatuan dalam menghayati keberagaman mencerminkan kerinduan umat manusia sepanjang zaman. Pancasila hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan, pedoman, dasar hidup bangsa yang mengandung realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa dan Negara serta dijadikan sebagai dasar dari penyelesaian masalah bagi manusia. Sebagaimana dikemukakan Abdulghani (1986), Pancasila sebagai sistem filsafat kemudian menjadi ideologi nasional yang menjadi pedoman masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam pendapat lain Sebagai sebuah sistem ideologi bangsa Wibisono (1996:3) menjelaskan pancasila mempunyai tiga unsur pokok didalamnya yaitu; 1) Rasionalitas, 2) Penghayatannya,

3) Kesusilaannya. Pada Realitas Sosial Nilai-Nilai Filsafat Pancasila memiliki ketidaksesuaian, merujuk pada ketidakcocokan atau perbedaan antara nilai-nilai ideal atau prinsip yang terdapat dalam filsafat Pancasila dan realitas atau praktik yang terjadi dalam masyarakat atau kehidupan sehari-hari. Ini mengindikasikan bahwa meskipun ada nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila, dalam kenyataannya, mungkin ada ketidaksesuaian di mana nilai-nilai ini tidak selalu tercermin atau diimplementasikan dengan baik dalam masyarakat atau dalam tindakan nyata.

Beberapa contoh ketidaksesuaian mungkin termasuk: 1) Ketidaksetaraan Sosial: Pancasila menekankan prinsip keadilan sosial, tetapi dalam kenyataannya masih ada kesenjangan ekonomi dan sosial yang besar di masyarakat Indonesia. 2) Korupsi: Meskipun Pancasila mengedepankan nilai-nilai kejujuran dan integritas, korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. 3) Toleransi Agama: Pancasila mempromosikan toleransi agama, tetapi terkadang ada konflik antaragama dan intoleransi yang terjadi. 4) Hak Asasi Manusia: Ada masalah dengan pelanggaran hak asasi manusia di beberapa kasus, yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara yang berarti sebagai sarana pemersatu cita-cita negara dan masyarakat, perlu diwujudkan secara konkrit dan dapat diterapkan secara fungsional, agar tidak hanya dijadikan semboyan saja. Ketetapan MPR menyatakan bahwa Pancasila hendaknya dilaksanakan dalam kehidupan bernegara dalam bentuk penerapan yang konsekuen. Pada mulanya konsep Pancasila dapat dipahami sebagai landasan bersama berbagai ideologi politik yang berkembang di Indonesia pada masa itu. Pancasila merupakan tawaran yang mampu menutupi perbedaan ideologi anggota BPUPKI. Pancasila saat itu dirumuskan oleh Sukarno sebagai asas bersama agar seluruh golongan di Indonesia dapat bersatu dan menerima asas tersebut. Menurut Adnan Buyung Nasution, telah terjadi perubahan fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebenarnya dimaksudkan sebagai wadah demokrasi bagi seluruh golongan di Indonesia. Perkembangan doktrin Pancasila mentransformasikannya dari fungsi awal Pancasila sebagai wadah bersama ideologi-ideologi politik dan aliran-aliran menjadi ideologi yang komprehensif dan terpadu sesuai rumusan pertama yang dikemukakan oleh Sukarno. Ideologi Pancasila merupakan ideologi unik yang berbeda dengan ideologi lainnya. Keputusan bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor 18 Tahun 1998, yaitu tentang pencabutan Ketetapan MPR Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pedoman Pengakuan dan Pengamalan Pancasila serta Ketetapan Pendiriannya. Pancasila. Yayasan Negara Pancasila. . Pasal 1 Ketetapan MPR menyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan UUD 1945 adalah landasan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang harus senantiasa diterapkan dalam kehidupan bernegara. Keputusan MPR tersebut menunjukkan bahwa kedudukan Pancasila sebagai ideologi nasional di Indonesia adalah kedudukannya sebagai landasan negara.

Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, secara otomatis seharusnya dalam sistem perekonomiannya menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini harus berlandaskan lima sila Pancasila yang cenderung kekeluargaan dan adil pada seluruh masyarakat. Perbedaan mencolok sistem ini dengan kapitalisme ialah apabila sistem kapitalisme cenderung mengabsahkan kesenjangan dan penindasan terhadap masyarakat yang lemah, eksploitasi dan juga individualisme, maka jika pada ekonomi Pancasila menghindarkan pada terjadinya penindasan dan eksploitasi, karena semua berdasarkan pada asas kekeluargaan. Semua yang bersifat kekeluargaan ini telah diatur sebagaimana rupa seperti pada pasal 33 UUD NRI 1945.

Sistem ekonomi Pancasila juga mengupayakan negara kita sebagai negara yang berdikari atau berdiri diatas kaki sendiri, sehingga negara kita tidak bergantung pada asing. Kerjasama dengan negara lain boleh-boleh saja dilakukan, tetapi negara kita tidak boleh lemah, juga harus memiliki kekuatan agar tidak dirugikan dan tidak merugikan yang lain. Kerjasama yang dilakukan harus menguntungkan kedua belah pihak. Penjabaran daripada nilai-nilai Pancasila ada pada konstitusi negara kita yakni UUD NRI 1945, maka pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi harus selalu menjadi acuan dalam setiap langkah mengambil kebijakan oleh pemerintah. Selain sebagai pertimbangan saat mengambil kebijakan ekonomi, konstitusi juga digunakan sebagai acuan

implementasi kebijakan tersebut dilapangan dan juga sebagai pengukur saat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil. Pancasila dan konstitusi yang sangat sesuai dengan kepribadian bangsa dengan berbagai tujuan dan cita-cita yang telah termaktub didalamnya tentu sangat mampu dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengukur ketajaman kebijakan ekonomi yang akan diputuskan (Baswir, 2009).

Namun dalam kenyataan dilapangan implementasi dari sistem ekonomi Pancasila ini dalam berbagai kebijakan publik yang menyangkaut tentang kebijakan tentang perekonomian masih mengalami berbagai kendala dan hambatan. Kendala yang muncul diantaranya ialah kendala yang berasal dari internal yakni dari si pembuat kebijakan itu sendiri, seringkali fenomena saat ini para pembuat kebijakan yang seharusnya melakukan tugasnya untuk tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat justru disusupi oleh kepentingan-kepentingan kelompok maupun individu, sehingga kebijakan yang diambil tidak murni berdasarkan nilai-nilai Pancasila.

Kebijakan perekonomian yang dipenuhi dengan unsur kepentingan suatu kelompok tertentu tersebut sudah pasti hanya menguntungkan segelintir orang saja dan justru merugikan masyarakat luas. Selain itu banyak pula para pembuat kebijakan yang saat ini sudah terkontaminasi dengan paham-paham kapitalisme liberal sehingga sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Kendala-kendala tersebut akhirnya menghambat internalisasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi sehingga membutuhkan sebuah solusi agar permasalahan dapat segera terselesaikan. Solusi yang dapat diambil ialah dengan memberikan refleksi atau pencerahan pada para pembuat kebijakan tersebut, selain pembuat kebijakan para penyelenggara negara dan para elit politik juga sangat perlu untuk diberikan pencerahan ini, pencerahan dapat melalui semacam pelatihan dasar atau diklat, sehingga dapat benar-benar dipahami dan nantinya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Keadilan sosial atau social justice merupakan masalah yang sudah lama menjadi perhatian para pemikir, khususnya filosof. Bangsa Indonesia mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir yang digambarkan sebagai masyarakat yang adil dan makmur, yang gemah ripah karta raharja, karena wujud akhir dari masyarakat bangsa yang dituju, jelas dimaksudkan sebagai masyarakat yang mengandung sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang lengkap, yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral. Secara singkat, masyarakat adil dan makmur yang dituju adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat idaman yang secara lengkap dan utuh didasarkan pada kelima sila dalam Pancasila dan muaranya pada sila yang kelima yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh diwujudkan melalui realisasi prinsip keadilan dalam tiap-tiap aspek keadilan, yaitu hukum, ekonomi politik, sosial budaya, dan moral yang semuanya berkaitan erat. Aspek keadilan sosial memang menjadi dambaan masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan.

pemerintah harus memastikan adanya kebijakan redistribusi yang memperhatikan kesenjangan ekonomi dan sosial antara berbagai lapisan masyarakat. Ini termasuk pengembangan program-program perlindungan sosial, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang layak bagi semua. untuk mempromosikan demokrasi, Pancasila mengamanatkan adanya partisipasi politik yang aktif dan inklusif dari seluruh warga negara. Ini melibatkan memperkuat lembaga-lembaga demokratis, seperti parlemen, serta memastikan adanya kebebasan berpendapat, pers, dan asosiasi. Pemerintah juga perlu memastikan proses pemilihan umum yang bersih dan transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap warga

negara untuk terlibat dalam proses politik. dalam memperkuat persatuan dan kesatuan, implementasi Pancasila membutuhkan pendekatan yang menghormati dan merayakan keragaman budaya, agama, dan suku di Indonesia. Pemerintah harus mempromosikan dialog antaragama dan antarsuku, serta menghindari politik identitas yang dapat memecah belah masyarakat. Pendidikan multikultural juga penting untuk membangun pemahaman dan toleransi yang lebih besar di antara berbagai kelompok. dalam konteks pemberantasan korupsi, Pancasila menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Implementasi Pancasila dalam hal ini melibatkan penguatan lembaga-lembaga anti-korupsi, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi, serta peningkatan kesadaran akan bahaya korupsi di masyarakat.

Pancasila menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan kemandirian nasional. Oleh karena itu, implementasi Pancasila dalam politik harus mengutamakan kepentingan nasional dan memastikan bahwa kebijakan ekonomi dan politik tidak tergantung pada kepentingan asing yang mungkin bertentangan dengan kepentingan bangsa Indonesia.

implementasi Pancasila juga memerlukan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Kolaborasi antarberbagai aktor ini penting untuk mencapai tujuan-tujuan Pancasila dalam politik Indonesia secara efektif dan berkelanjutan. Dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, implementasi Pancasila dalam politik Indonesia dapat membawa kemajuan yang signifikan menuju negara yang lebih adil, demokratis, dan bersatu.

KESIMPULAN

konsep keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan utama yang terkandung dalam Filsafat Pancasila. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat ketidaksesuaian antara nilai-nilai ideal Pancasila dengan praktik di lapangan, terutama dalam konteks kebijakan ekonomi dan politik. Beberapa kendala seperti korupsi, ketidaksetaraan sosial, dan pengaruh paham kapitalisme liberal menghambat realisasi nilai-nilai Pancasila. Solusi yang diusulkan meliputi refleksi dan pencerahan bagi para pembuat kebijakan serta perlunya kebijakan redistribusi untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Implementasi Pancasila dalam politik juga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan untuk mencapai kemajuan yang signifikan menuju negara yang lebih adil, demokratis, dan bersatu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Andreas sinabariba ,(2023), ketidaksesuaian antara realitas sosial dan nilai - nilai filsafat Pancasila, jurnal pengembangan pendidikan, Vol. 7 No. 5 225-232
- Character building ,(2014), Pancasila, keadilan sosial,dan persatuan Indonesia,*jurnal pendidikan Pancasila*, Vol 5, No. 6 107-112
- Dawam Rahardjo. (2001). Ekonomi-Politik Transisi ke Demokrasi di Indonesia.*Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 2 No.1, Januari-April.
- Hariato. (2006). Pancasila dan Problem Keadilan Sosial di Indonesia: Mengingat Kembali Visi, Misi,dan Program SBY-JK. Dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus (Eds.), *Jurnal Restorasi Pancasila*, 264-281. Bogor: Brighten Press.
- Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Keadilan Menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.23 No.3, 503-528.
- Kuncoro, M. (2001). Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas. Tinjauan buku Mubyarto Membangun Sistem Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 16, No. 1, 88– 96.
- Kenlies era Rosalina, (2022), implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam kebijakan pemerintah Indonesia, *jurnal sistem ekonomi Pancasila*, Vol 5 No. 3 , 27-42
- Mubyarto. (1987). Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan. *Jurnal pendidikan Jakarta: LP3ES*, Vol 8. No. 4 10-31

- Sastrapratedja, M., 1991, Dalam Pancasila Sebagai Ideologi. *Jurnal Pancasila Sebagai Landasan Ideologi Dalam Kehidupan Budaya*, Jakarta: BP-7 Pusat. Vol 2.No. 1,110,121
- Septiana dwiputri Maharani , (2019) , indeks ketahanan ideologi Pancasila, *jurnal ketahanan nasional*, Vol. 25 No. 1 277-294